



Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 4, No. 2, 2023

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BAHAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA KELURAHAN SURADE

Neneng Saadah^{1*}, Gatot Wahyu Nugroho²

^{1*}Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia

Nenengsaadah25@gmail.com^{1*}, gatotwahyunu2@gmail.com²

ABSTRACT

The objectives of this study are: 1) to explain how the data collection of BPNT and PKH programs in Surade Village, 2) To explain how the implementation of BPNT programs in Surade Village, 3) To explain how the implementation of PKH in Surade Village, 4) To explain the accountability of BPNT and PKH program management in Surade Village. This research uses qualitative methods with a descriptive approach, data collection techniques using observation, interviews, and documentation, Data analysis techniques used are: data collection, data reduction, data presentation and conclusion making or verification.

The results of this study show: 1) the data collection of the two programs in Surade village is still not fully updated every stage, 2) the implementation of BPNT in Surade village still has to require close supervision so that unwanted events do not occur, 3) the implementation of PKH in Surade village also still has to require strict supervision so that fraud does not occur which leads to unwanted things, 4) accountability of BPNT and PKH management is still not arguably effective and efficient, judging from the number of residents who still complain about cases of mistargeting.

Keywords: *Management Accountability, Non-Cash Food Assistance (BPNT), Family Hope Program (PKH).*

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini yaitu : 1) untuk menjelaskan bagaimana pendataan program BPNT dan PKH di Kelurahan Surade, 2) Untuk Menjelaskan bagaimana pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Surade, 3) Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan PKH di Kelurahan Surade, 4) Untuk menjelaskan akuntabilitas pengelolaan program BPNT dan PKH di Kelurahan Surade. Peneliian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, Teknik analisis data yang digunakan yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan : 1) pendataan kedua program di Kelurahan Surade ini masih belum sepenuhnya diperbarui setiap tahapnya, 2) pelaksanaan BPNT di Kelurahan Surade ini masih harus

memerlukan pengawasan yang cukup ketat agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan, 3) pelaksanaan PKH di Kelurahan Surade juga masih harus memerlukan pengawasan yang cukup ketat agar tidak terjadi kecurangan yang berujung menimbulkan hal yang tidak diinginkan, 4) akuntabilitas pengelolaan BPNT dan PKH masih belum bisa dibilang efektif dan efisien dilihat dari masih banyaknya warga yang mengeluh terkait kasus salah sasaran.

Kata Kunci: Akuntabilitas Pengelolaan, Bahan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH)

PENDAHULUAN

Untuk mencapai suatu perwujudan yang ideal, pemerintah Indonesia telah memastikan program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi untuk memperkuat kebijakan jaring pengaman sosial. Hal itu merupakan salah satu bentuk upaya untuk membantu warga negara dalam menghadapi masalah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sekaligus sebagai usaha pengentasan kemiskinan dalam patokan kesejahteraan negaranya.

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BPNT memberikan bantuan pangan non-tunai secara langsung kepada keluarga penerima manfaat (KPM) melalui kartu elektronik yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di pedagang yang telah ditunjuk. Sedangkan PKH memberikan bantuan finansial kepada KPM yang telah memenuhi syarat untuk membantu membiayai kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi.

Di Kelurahan Surade kedua program ini sudah ada sejak tahun 2017. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa permasalahan yang muncul terkait dengan akuntabilitas pengelolaan BPNT dan PKH. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan program tersebut, sehingga menimbulkan dugaan adanya praktik korupsi, kasus salah sasaran, penyalahgunaan wewenang, dan penggelapan dana.

Kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan BPNT dan PKH dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana, lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian internal, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian program.

Menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Koppell (2005) mengatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan merupakan kewajiban untuk bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya publik dan memberikan penjelasan kepada publik tentang bagaimana sumber daya tersebut digunakan. Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, akuntabilitas pengelolaan menjadi sangat penting karena melibatkan pengelolaan anggaran publik yang bersumber dari pajak dan dana publik lainnya. Oleh karena itu, akuntabilitas pengelolaan harus dipenuhi agar masyarakat dapat memastikan bahwa anggaran publik digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Akuntabilitas pengelolaan juga dapat membantu meminimalkan terjadinya tindakan korupsi dan penyelewengan anggaran.

Untuk kategori penerima PKH yaitu ibu hamil dan memiliki anak balita atau usia anak 5-7 tahun, atau memiliki anak yang belum menyelesaikan pendidikan dan yang paling utama memenuhi kriteria miskin, memiliki komponen PKH dalam satu KK lalu sudah masuk DTKS dan sudah ditetapkan oleh kementerian sosial sebagai penerima PKH. Dan untuk kategori penerima BPNT tidak jauh beda dengan PKH harus termasuk kedalam masyarakat kurang mampu atau miskin, harus tercatat di DTKS dan bukan PNS, TNI atau POLRI. Ketentuan penerima bantuan sosial ini tercatat di kementerian sosial.

KAJIAN LITERATUR

BAHAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT)

BPNT atau bantuan pangan non tunai merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai yang jika di Rupiahkan sebesar 200.000,- dan hanya bisa diambil dalam bentuk sembako yang diberikan pemerintah pada masyarakat kurang mampu setiap bulan (Kemensos,2018). sistem penyaluran bantuan pangan non tunai ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Bantuan ini diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitas sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai kepada masyarakat dinilai lebih efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, serta tepat administrasi.

Berikut Anggaran dan KPM BPNT Kelurahan Surade dari Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah KPM	Per 3 bulan	Pertahun
2018	195	Rp. 200.000	Rp 39.000.000.
2019	195	Rp. 200.000	Rp 39.000.000
2020	302	Rp. 200.000	Rp 60.000.000
2021	302	Rp. 200.000	Rp 60.000.000
2022	302	Rp. 200.000	Rp 60.000.000

Sumber : Kelurahan Surade,diolah Oleh Penenliti

Uang 200.000 hanya bisa diambil dalam bentuk sembako dengan rincian sembako beras 12kg, telur 45 butir, buah-buahan seperti pir 12 biji atau 3kg, dan kacang-kacangan 1,½ kg.

PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

Bantuan PKH adalah bantuana berupa uang, barang dan jasa kepada keluarga atau seseorang miskin, tidak mampu dan rentan terhadap sosial. Pemberi bantuan sosial ini adalah satuan kerja pada kementerian atau lembaga pada pemerintah atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitas sosial, dan pelayanan dasar. Keluarga penerima pelayanan yang sering disebut keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan (Permensos Nomor 1 Tahun 2018, BAB I)

Berikut Anggrana dan Kategori KMP Kelurahan Surade Tahun 2018-2022

Tahun	Kategori	Jumlah	Per 3 bulan	Pertahun
2018	IBU HAMIL	15	Rp 750.000,00	Rp 11.250.000,00
	USIA DINI	55	Rp 750.000,00	Rp 41.250.000,00
	SD	178	Rp 225.000,00	Rp 40.050.000,00
	SMP	66	Rp 375.000,00	Rp 24.750.000,00
	SMA	50	Rp 500.000,00	Rp 25.000.000,00
	LANJUT USIA	25	Rp 600.000,00	Rp 15.000.000,00
	DISABILITAS	5	Rp 600.000,00	Rp 3.000.000,00
	TOTAL	394	Rp 3.800.000,00	Rp 160.300.000,00
2019	IBU HAMIL	15	Rp 750.000,00	Rp 11.250.000,00
	USIA DINI	55	Rp 750.000,00	Rp 41.250.000,00
	SD	178	Rp 225.000,00	Rp 40.050.000,00
	SMP	66	Rp 375.000,00	Rp 24.750.000,00
	SMA	50	Rp 500.000,00	Rp 25.000.000,00
	LANJUT USIA	25	Rp 600.000,00	Rp 15.000.000,00
	DISABILITAS	5	Rp 600.000,00	Rp 3.000.000,00
	TOTAL	394	Rp 3.800.000,00	Rp 160.300.000,00
2020	IBU HAMIL	15	Rp 750.000,00	Rp 11.250.000,00
	USIA DINI	55	Rp 750.000,00	Rp 41.250.000,00

	SD	178	Rp 225.000,00	Rp 40.050.000,00
	SMP	66	Rp 375.000,00	Rp 24.750.000,00
	SMA	50	Rp 500.000,00	Rp 25.000.000,00
	LANJUT USIA	40	Rp 600.000,00	Rp 24.000.000,00
	DISABILITAS	3	Rp 600.000,00	Rp 1.800.000,00
	TOTAL	407	Rp 3.800.000,00	Rp 168.100.000,00
2021	IBU HAMIL	15	Rp 750.000,00	Rp 11.250.000,00
	USIA DINI	55	Rp 750.000,00	Rp 41.250.000,00
	SD	220	Rp 225.000,00	Rp 49.500.000,00
	SMP	60	Rp 375.000,00	Rp 22.500.000,00
	SMA	55	Rp 500.000,00	Rp 27.500.000,00
	LANJUT USIA	60	Rp 600.000,00	Rp 36.000.000,00
	DISABILITAS	3	Rp 600.000,00	Rp 1.800.000,00
	TOTAL	468	Rp 3.800.000,00	Rp 189.800.000,00
2022	IBU HAMIL	13	Rp 750.000,00	Rp 9.750.000,00
	USIA DINI	68	Rp 750.000,00	Rp 51.000.000,00
	SD	205	Rp 225.000,00	Rp 46.125.000,00
	SMP	79	Rp 375.000,00	Rp 29.625.000,00
	SMA	61	Rp 500.000,00	Rp 30.500.000,00
	LANJUT USIA	60	Rp 600.000,00	Rp 36.000.000,00
	DISABILITAS	2	Rp 600.000,00	Rp 1.200.000,00
	TOTAL	488	Rp 3.800.000,00	Rp 204.200.000,00

Sumber : Kelurahan Surade, diolah oleh peneliti

Permasalahan lainnya banyaknya pengaduan yang didapatkan, hal tersebut mencerminkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam pelayanan publik. Dalam pelayanan publik perlu adanya perwujudan yang mencerminkan prinsip *good governance*, maka salah satu kunci yang dapat mencerminkan prinsip tersebut adalah prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas ini dapat mengukur seberapa besar kesesuaian pengelolaan pelayanan publik oleh para *stakeholder* atau para penyelenggara. Akuntabilitas ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi yang dapat meningkatkan kinerja penyelenggara dalam pengelolaan tersebut sehingga dapat menghasilkan *outcome* yang diinginkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sangat diperlukan untuk penelitian ilmiah karena metode penelitian adalah metode untuk memperoleh tujuan. Jadi tujuan umum dari penelitian ini merupakan untuk memperjelas masalah dan langkah-langkah yang akan diambil mengenai masalah yang dirumuskan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara kepada narasumber atau responden, yaitu dengan sarana untuk mendapatkan informan ataupun data yang dibutuhkan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen yang terdapat di Kelurahan Surade.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis pada penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh data dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi data.

Dalam penelitian kualitatif teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang dirumuskan dalam proposal. Miles dan Huberman (1984), mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi lokasi penelitian

Sebelum dikenal dengan nama Kelurahan Surade nama awal dari Kelurahan Surade adalah Desa Swakarya, Tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2008 tentang pembentukan Kelurahan Surade Kecamatan Surade bahwa pada tahun 2008 desa swakarya resmi diganti menjadi Kelurahan Surade. Peresmian Kelurahan Surade dilaksanakan oleh Bupati pada saat habis masa jabatan kepada Desa Swakarya. Tujuan pembentukan Kelurahan tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, terutama dalam pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Secara demografi, jumlah penduduk Kelurahan Surade Kecamatan Surade cenderung tetap dengan mutasi lahir, mati, pindah datang dan pindah pergi. Pada tahun 2022 8.934 jiwa dengan laki-laki 4.508 dan perempuan 4.426 dengan 14 RW dan 49 RT. Mata pencaharian penduduk Kelurahan Surade sebagian besar bekerja sebagai petani, buruh tani, sektor perdagangan dan jasa.

Pendataan BPNT dan PKH

Pendataan BPNT dan PKH dilakukan oleh pemerintah untuk mengidentifikasi keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria kedua program. Pendataan kedua program di Kelurahan Surade sendiri cukup efektif dan efisien dimana pendataan ini mengacu pada sumber resmi terkait atau menghubungi kementerian atau instansi terkait informasi terbaru.

Untuk langkah-langkah pendataan kedua program ini yaitu dimulai dengan Identifikasi Sasaran proses ini dilakukan untuk mengidentifikasi kelompok atau individu yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat program tersebut.

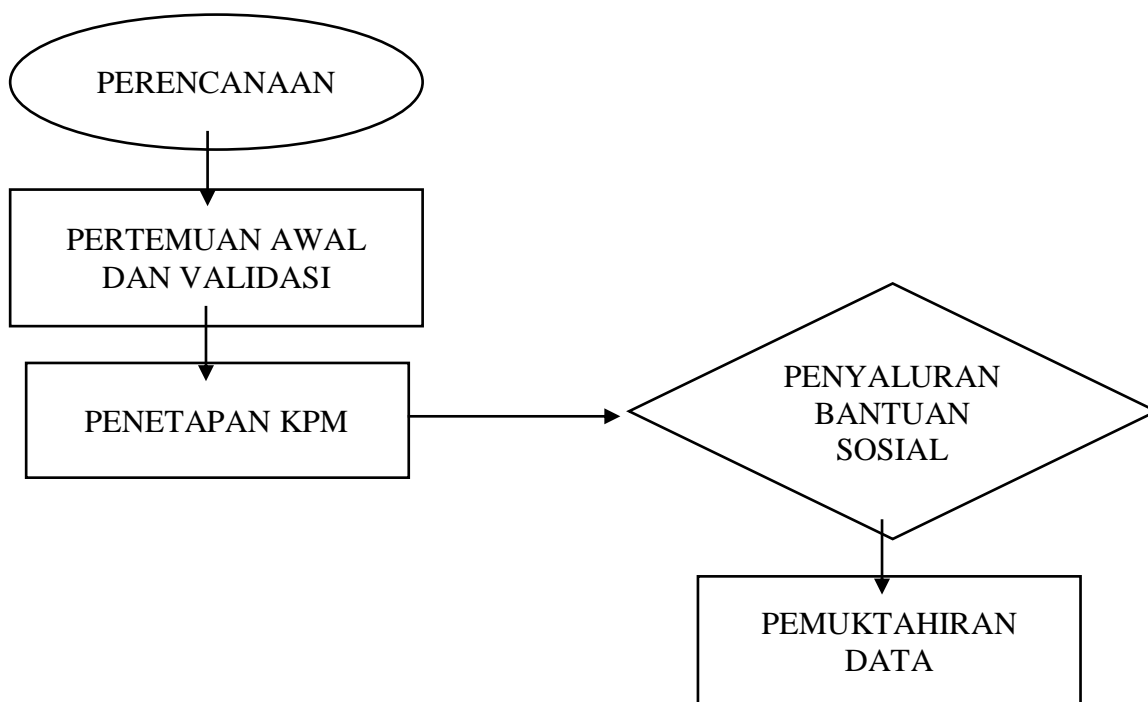
Pelaksanaan BPNT

Pelaksanaan BPNT di Kelurahan Surade terbilang cukup efektif walaupun masih ada beberapa kendala yang kadang terjadi. Karena Kelurahan Surade belum memiliki e-warung jadi Kelurahan Surade bekerja sama dengan e-warung yang ada di desa Gunungsungging, dan untuk pembagian sembako Kelurahan Surade telah menetapkan tempatnya diperum Kp. Dangdeur Kulon, dan untuk pembagiannya diadakan tiga tahap dalam satu tahun yaitu tiga bulan sekali.

Pelaksanaan BPNT melibatkan serangkaian kegiatan yang dilakukan Kelurahan terkait untuk menyediakan bantuan pangan kepada keluarga miskin atau renta. Untuk membantu mempermudah warga maka Kelurahan Surade telah menyiapkan tempat yang dekat dengan rumah warga dan agar dapat mudah dijangkau, maka sembako dari e-warung Gunungsungging dikirim ke daerah Surade jadinya warga tidak perlu ke Gunungsungging untuk mengambil sembako. Kelurahan Surade mempermudah pembagian dengan membagikan langsung bantuan tersebut kepada warga sesuai dengan jumlah dan sasaran yang tepat.

Pelaksanaan PKH

Untuk pelaksanaan PKH di Kelurahan Surade untuk saat ini bisa dibilang efektif dan efisien, mulai dari anggaran dan jumlah penerima sesuai dengan data yang ada. Untuk proses pelaksanaan PKH di Kelurahan Surade mengikuti alur dari kemensos dapat dilihat dari gambar dibawah ini :



Gambar 4.7 Flowchart Alur Pelaksanaan PKH

Perencanaan

Perencanaan dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah KPM. Lokasi pembagian PKH di Kelurahan Surade biasanya dilaksanakan di perum Kp. Dangdeur Kulon. Untuk KPM nya sendiri bertambah dari tahun ke tahun dan ada juga yang berkurang. Untuk berkurang itu dikarenakan ada yang meninggal atau pindah domisili.

Berikut data penerima manfaat PKH dari tahun 2018-2022

Tabel 4.4 KPM PKH Tahun 2018-2022

Kategori	2018	2019	2020	2021	2022
Ibu Hamil	15	15	15	15	13
Usia Dini	55	55	55	55	68
SD	178	178	178	220	205
SMP	66	66	66	60	79
SMA	50	50	50	55	61
Lanjut Usia	25	25	40	60	60
Disabilitas	5	5	3	3	2
TOTAL	394	394	407	468	488

Sumber : Kelurahan Surade, diolah oleh peneliti

Pertemuan awal dan validasi

Pendamping PKH akan melaksanakan sosialisasi pada pertemuan awal agar calon KPM PKH memiliki pemahaman tentang PKH dan kesiapan sebagai penerima manfaat PKH.

Penetapan KPM PKH

Data yang setatus rekeningnya aktif selanjutnya ditetapkan sebagai KPM PKH, penetapan ini ditetapkan melalui surat keputusan yang diberikan kepada Rt masing-masing warga ataupun pengumuman langsung dari kantor Kelurahan.

Penyaluran Bantuan Sosial

Bantuan sosial PKH diberikan dalam bentuk uang kepada KPM yang sudah ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH. Untuk anggaran dana PKH yaitu bersumber dari APBD, karena statusnya Kelurahan maka Kelurahan bekerja sama dengan pendamping PKH kecamatan. Bantuan sosial yang

diterima oleh para KPM PKH dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, modal usaha dan kebutuhan lainnya yang mendukung tercapinya tujuan PKH.

Akuntabilitas Pengelolaan BPNT dan PKH

Menurut hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti terkait dengan akuntabilitas pengelolaan BPNT dan PKH di Kelurahan Surade menerangkan bahwa akuntabilitas pengelolaan BPNT dan PKH yang dilakukan Kelurahan Surade telah menerapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Non Tunai dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Akuntabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laporan realisasi pelaksanaan BPNT dan PKH. Berikut adalah laporan realisasi BPNT dan PKH tahun 2018-2022.

Tabel 4.6 Realisasi pelaksanaan BPNT dan PKH

TAHUN	PKH	BPNT	TEREALISASI
2018	394	195	TEREALISASI
2019	394	195	TEREALISASI
2020	407	302	TEREALISASI
2021	468	302	TEREALISASI
2022	488	302	TEREALISASI

Laporan realisasi pelaksanaan adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi jumlah penerima manfaat kedua program tersebut. berikut ini adalah keterangan dari bapak Handri Suwarta selaku lurah Surade terkait dengan bentuk akuntabilitas pengelolaan BPNT dan PKH yang dilakukan oleh petugas Kelurahan Surade bahwa realisasi pelaksanaan BPNT dan PKH telah dilakukan, sebelumnya dilakukan sosialisasi dengan manghadirkan masyarakatnya langsung mengenai apa saja yang berkaitan dengan kedua program tersebut agar masyarakat tidak salah paham dan menimbulkan kecemburuan sosial karna pada dasarnya kedua program ini diadakan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bukan kecemburuan sosial.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan BPNT dan PKH yang dilakukan pada Kelurahan Surade yang bertempat di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, dari hasil pengumpulan data, pengolahan data serta analisis data yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendataan BPNT dan PKH merupakan langkah penting dalam upaya pemerintah untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan keluarga yang membutuhkan bantuan sosial. Pendataan BPNT bertujuan untuk menyusun daftar penerima manfaat yang memenuhi kriteria dan memberikan akses mereka ke bantuan pangan non tunai dan juga untuk pendataan PKH dilakukan untuk mengidentifikasi dan memberikan bantuan kepada keluarga miskin dan rentan, dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga.
2. Pelaksanaan BPNT telah membawa perubahan positif dalam penyaluran bantuan pangan di Kelurahan Surade dengan mengganti sistem tunai menjadi non-tunai, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan dan memastikan penerima mendapatkan akses yang lebih mudah. Program ini telah membantu meningkatkan akses keluarga miskin dan rentan terhadap pangan berkualitas, serta mendorong keuangan melalui penggunaan kartu elektronik.
3. Pelaksanaan PKH telah memberikan manfaat besar bagi keluarga miskin dan rentan di Kelurahan Surade dengan memberikan bantuan langsung dan terprogram untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan. Program ini berhasil meningkatkan akses keluarga terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta memberikan dorongan bagi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan mereka

4. Akuntabilitas dalam pengelolaan BPNT dan PKH sangat penting untuk memastikan transparansi, efektivitas dan efisiensi dalam penyaluran kedua program ini. Kelurahan Surade harus memastikan proses pendataan dilakukan dengan tepat, memeriksa keabsahan data, dan mengawasi secara ketat distribusi dan penggunaan dana bantuan. Pengawasan dan pemantauan yang ketat juga diperlukan untuk mencegah praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran lainnya dalam pelaksanaan program BPNT dan PKH.

Program BPNT dan PKH memberikan manfaat yang sangat penting bagi keluarga miskin dan rentan di Kelurahan Surade. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada pendataan yang akurat, pelaksanaan yang baik, serta pengelolaan yang akuntabel. Kelurahan Surade harus terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi program ini untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

DAFTAR LITERATUR

- Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Public, t. Cet; UGM Press; Yogyakarta, 2006.
- Amarudin, A. A., & Khorib, A. (2022). *Implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) George R. Terry's Management Function Perspective during the Pandemic Period in Tambakrejo Village, Jombang. INCOME: Innovation of Economics and Management*, 2(1), 8-16.
- Anwar. Nasruddin. Nina. Ridwan. (2018). *Transparansi dan Akuntabilitas Pelaksanaan serta Penatausahaan Belanja Bantuan Sosial pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sigi*. [Internet], Vol6No6,ISSN:2302-2019.
- Arapah, N. (2020). Analisis Pengaruh Bantuan Sosial PKH Dan Sembako Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Ditengah Pandemic Covid 19 Di Kabupaten Barito Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi (Manajemen Perusahaan) Dan Bisnis*, 4(02), 57–65. <https://doi.org/10.51512/jimb.v4i02.58>
- Arikunto. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta, 2000. Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Pendek Hubungan Kompetensi Guru dan Pembelajaran Tematik Terhadap Hasil Belajar Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Jember Tahun Pelajaran 2018/2019. *atan Praktik*. Jakarta: PT
- Dr. H. A. Rusdiana, M. &. (Agustus, 2018). *Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Penelitian*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung.
- Dr. Lilis Sulastri, M. (Februari, 2012). *manajemen*. Bandung: La Goods Publishing.
- Dr. M. Anang Firmansyah, S. M. (januari, 2018). *pengantar manajemen*. Surabaya: CV Budi Utama.
- George R. Terry. 2006. Prinsip- Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gultom, H., Kindangen, P., & Kawung, G. M. (2020). Analisis pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 20(4).
- Gusti, Y. K. *Improving the Welfare of the Poor with Quality Assistants and Quality of the Family Hope Program (PKH) in Community Empowerment in Makassar City. In Proceedings of the 2nd South American International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*.
- Hasna, N. M., Nugraha, N., & Mustikarini, I. D. (2020). Analisis dampak pemberian bantuan program keluarga harapan (pkh) terhadap kesejahteraan masyarakat. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 108-116.
- Hasniati, Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik (JAKPP)*, Vol. 02 No. 1 Juni 2016
- Herianti, H., & Arifin, S. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa TA 2018 di Kecamatan Palakka menurut perspektif keuangan publik islam. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 3(1), 21-42.
- JoHasimi, D. M. (2020). Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 1(1), 81-94. *urnal*, 3(1), 27-36.

- Makalalag, Astri Juainita; Nangoi, Grace B; Karamoy, Herman;. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing* Vol.8, No.1
- Nasrullah, M. A., & Annisa, R. (2021). Analisis Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Tanah Laut Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 4(2), 95-101.
- Nurhadji, I. D. M. N., & Mustikarini. (2019). Analisis dampak pemberian bantuan program keluarga harapan (pkh) terhadap kesejahteraan masyarakat. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 108–116.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
- Putri, R. A., Kusumastuti, E. D., & Novianty, I. (2022). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Pangan Nontunai pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Garut). *Indonesian Accounting Research*
- Rahmah, N. A., Pratiwi, L., & Rismayani, G. (2021). Analisis pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa sindangkasih di era pandemi covid-19. *Jurnal ekonomi perjuangan*, 3(2), 55-67.
- Sugiyono, P.D. (Oktober 2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sutanti, I., (2019, Agustus 09), 'Kemensos' Program Keluarga Harapan (PKH) tersedia di <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>
- Usman, H. (2013). Manajemen: teori, praktik, dan riset pendidikan.
- Vitasari, D. (2021). Efektivitas Pengelolaan Bantuan Pangan Non-Tunai Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (Studi Kasus di Kelurahan Dr. Soetomo dan Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari. Kota Surabaya, Jawa Timur) [Doctoral dissertation]. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.